

## PERKEMBANGAN KEUANGAN BERSTANDAR AKUNTANSI AKRUAL

**Gilang Ganjar Amrih**  
Universitas Budi Luhur  
gilang.ganjar@gmail.com

### **Abstrak**

Sistem akuntansi harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku dan memastikan bahwa data keuangan yang direkam dan disimpan di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi. Sistem akuntansi yang baik dapat membantu entitas dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pelaporan administrasi dengan tepat. Metodologi penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif. Pendekatan library research. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis kas digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Sementara itu, basis akrual digunakan untuk mengakui pendapatan dan biaya pada saat terjadinya, tidak peduli apakah transaksi tersebut telah terbayar atau belum. Dengan menggunakan basis akrual, informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan representatif

**Kata kunci:** keuangan; perkembangan; akuntansi akrual.

### **Abstract**

*The accounting system must comply with applicable accounting principles and ensure that the financial data recorded and stored in it can be accounted for and verified. A good accounting system can help entities manage their finances more effectively. The purpose of this study is to improve administrative reporting appropriately. Research methodology with descriptive qualitative type. Library research approach. The results of the study illustrate that Government Accounting Standards (SAP) use a cash basis to recognize revenue, expenditure and financing transactions, and use an accrual basis to recognize assets, liabilities and fund equity. The cash basis is used to record financial transactions related to cash receipts and cash disbursements in a certain period. Meanwhile, the accrual basis is used to recognize income and expenses when they are incurred, regardless of whether the transaction has been paid for or not. By using the accrual basis, the resulting financial information can be more accurate and representative*

**Keywords:** finance; development; accrual accounting.

### **Pendahuluan**

(Christian, Veronica, & Lim, 2021) berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada laporan tahun 2020 menunjukkan kasus kecurangan laporan keuangan di Asia Pasifik berada di urutan ketiga dari 8 bagian negara yaitu sebanyak 198 kasus yang menyebabkan rata-rata

## Gilang Ganjar Amrih

kerugian mencapai US\$ 1.988.000 (ACFE, 2020a). Di bagian Asia Pasifik sendiri menunjukkan kasus tertinggi diperoleh dari Indonesia yaitu sebanyak 36 kasus, sedangkan Thailand sebanyak 6 kasus (ACFE, 2020b). Metode yang dilakukan untuk mengatasi kecurangan akuntansi yaitu dengan dilakukan audit oleh pihak eksternal. Melalui adanya perencanaan sistem maka terbentuknya (*Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011, 2011*) Perancangan penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual) baru saja diterbitkan dan belum diimplementasikan sepenuhnya, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Perancangan penerapan akuntansi berbasis akrual melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Penetapan Kebijakan: Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini meliputi penetapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dan pembentukan badan pengatur yang bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan standar tersebut.

Pelatihan dan Edukasi Pelatihan dan edukasi penting untuk memastikan bahwa para pegawai dan pengambil keputusan paham dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dan mampu menerapkannya secara efektif. Hal ini meliputi pelatihan khusus bagi para akuntan, auditor, dan pegawai pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses akuntansi. Sistem Akuntansi yang Terintegrasi: Sistem akuntansi yang terintegrasi dapat membantu memudahkan proses pelaporan keuangan dan memastikan penggunaan data yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua bagian pemerintah yang terkait.

Monitoring dan Evaluasi, Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari penerapan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang ditetapkan terpenuhi dan sistem akuntansi yang terintegrasi berfungsi dengan baik. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti penyusunan rencana kerja, pengaturan pengeluaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta terciptanya laporan keuangan yang akurat dan transparan bagi publik.

(*Analisis Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011, 2011*) SAP berbasis akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi dipastikan akan berubah. Hal tersebut berlaku demikian dengan kapasitas dan kemampuan SDM yang harus ditingkatkan, karena SAP berbasis akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi adalah aturan dan metode yang digunakan dalam mengelola keuangan suatu entitas dan merekam transaksi keuangan dalam sistem akuntansi. Aturan dan metode ini bertujuan untuk memastikan

## **Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal**

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dapat dipercaya, dan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Peraturan pelaksanaan dapat meliputi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh badan pengatur seperti otoritas keuangan, Bursa Efek, atau badan pengawas lainnya. Aturan-aturan ini bisa terkait dengan pengungkapan informasi keuangan, pelaporan keuangan, pengauditan, atau praktik bisnis lainnya.

Sistem akuntansi, di sisi lain, adalah kumpulan prosedur dan aturan yang digunakan untuk merekam transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan., pelaporan keuangan mereka. (Manossoh, 2015) Good Government governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatasi masalah keuangan di Indonesia.

Pemerintah dapat membantu mengatasi masalah keuangan di Indonesia. Kebijakan fiskal Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengeluaran. Ini dapat mencakup meningkatkan tarif pajak, mengurangi subsidi, mengurangi defisit anggaran, dan memperkuat perpajakan. Kebijakan moneter Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, dan menstabilkan nilai tukar. Langkah-langkah seperti ini dapat membantu mengurangi tekanan keuangan pada masyarakat dan membantu menstabilkan perekonomian. Penguatan sektor keuangan Pemerintah dapat memperkuat sektor keuangan di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi risiko keuangan. Ini dapat mencakup pengembangan pasar keuangan, meningkatkan regulasi dan pengawasan, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.

Peningkatan investasi Pemerintah dapat meningkatkan investasi di Indonesia dengan memberikan insentif dan fasilitas bagi investor. Ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Reformasi struktural: Pemerintah dapat melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan Indonesia. Ini dapat mencakup reformasi sektor publik, reformasi perpajakan, dan reformasi kebijakan fiskal. Dalam mengatasi masalah keuangan di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Ini dapat membantu memperkuat dukungan dan memastikan kesuksesan dari langkah-langkah yang diambil. Perbedaan pengaturan standarisasi keuangan konvensional dengan syariah (Izzaty, Astuti, & Cholimah, 1967) Akuntansi syariah adalah alat pertanggungjawaban, yang diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip full disclosure. Prinsip full disclosure merupakan prinsip akuntansi yang menekankan pentingnya pengungkapan seluruh informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Artinya, perusahaan harus menyajikan

## Gilang Ganjar Amrih

seluruh informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat mempengaruhi pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat.

Prinsip full disclosure, perusahaan harus menyajikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi keuangan dan operasionalnya. Informasi yang disajikan harus mencakup semua aspek bisnis yang penting, termasuk informasi tentang aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, risiko, serta kebijakan dan praktik bisnis yang diterapkan. Prinsip full disclosure memiliki tujuan untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap. Prinsip ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan investor.

Dalam prakteknya, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi biasanya ditetapkan oleh manajemen entitas atau oleh profesional akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan entitas tersebut. Aturan dan sistem ini harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan pengguna laporan keuangan

(Habsari, Sahabuddin, & ..., 2022) Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Admindex) per Juni 2021, total penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa. Demikian juga jumlah penduduk Indonesia yang besar, dapat menjadi keuntungan sebagai potensi bagi kekuatan pertahanan dan juga sebagai ancaman jika tidak diberdayakan dengan baik untuk pertahanan. Undang-Undang. Undang-Undang Pertahanan Negara No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan negara. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi keuntungan bagi pertahanan negara jika SDM tersebut diberdayakan secara efektif untuk memperkuat kekuatan pertahanan.

Konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan peran penduduk dalam pertahanan negara. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui program wajib militer atau TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan militer untuk memperkuat kemampuan SDM dalam bidang pertahanan. jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Jika penduduk tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, maka mereka dapat menjadi sumber ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu, jika penduduk tidak terlibat dalam pembangunan negara dan tidak merasa memiliki negara mereka, mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang merugikan kepentingan nasional. potensi penduduk yang besar sebagai kekuatan pertahanan,

(Burhany, 2013) Kesadaran manajemen untuk melakukan pengelolaan lingkungan saat ini dapat dikatakan masih relatif rendah. Dengan demikian maka kinerja lingkungan per- usahaan sebagian besar juga masih berada pada level sedang dan rendah. Ini ditunjukkan oleh peringkat kinerja lingkungan per- usahaan periode 2010 yang dipublikasi oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dari 690

## **Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal**

perusahaan yang dinilai kinerja lingkungannya, hanya 8,12% yang berada pada peringkat tinggi, sedangkan 63,04% berada pada peringkat sedang, dan 28,84% berada pada peringkat rendah (Sekretariat PROPER Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2010). pemerintah harus mengambil tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan penduduk dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan cara ini, penduduk dapat menjadi sumber daya yang kuat bagi pertahanan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(Gibbs, 2020) permasalahan mendasarnya adalah pemahaman dan paradigma pemerintah, pelaku ekonomi dan pelaku bisnis serta para pihak yang terlibat dalam mata rantai pembangunan ekonomi dan bisnis tentang hakikat, peran strategis dan strategi untuk menghidupkan ekonomi dan bisnis masih sangat terbatas atau lemah. Pemahaman dan paradigma yang terbatas atau lemah terkait dengan menghidupkan ekonomi dan bisnis dapat menghambat perkembangan keberlanjutan ekonomi dan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku ekonomi, pelaku bisnis, dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dan bisnis untuk memahami hakikat, peran strategis, dan strategi untuk menghidupkan ekonomi dan bisnis. Secara umum, menghidupkan ekonomi dan bisnis mengacu pada upaya untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Hal ini melibatkan perubahan paradigma dan pemahaman tentang bagaimana cara kita menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, serta bagaimana kita mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menghidupkan ekonomi dan bisnis, seperti mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, memberikan insentif kepada pelaku bisnis untuk menggunakan teknologi dan praktek berkelanjutan, dan memastikan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat dalam kebijakan dan praktik ekonomi dan bisnis. Pelaku ekonomi dan bisnis juga memiliki peran strategis dalam menghidupkan ekonomi dan bisnis, seperti mengembangkan teknologi dan praktik berkelanjutan, menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan menjalin kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor non-profit untuk memperkuat kapasitas dan mempromosikan pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan.

Para pihak yang terlibat dalam mata rantai pembangunan ekonomi dan bisnis, seperti masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, juga memiliki peran penting dalam menghidupkan ekonomi dan bisnis dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, serta memberikan kritik dan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah dan pelaku ekonomi dan bisnis dalam upaya mencapai keberlanjutan ekonomi dan bisnis. strategi untuk menghidupkan ekonomi dan bisnis, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti mengembangkan teknologi dan praktik berkelanjutan, membangun

## **Gilang Ganjar Amrih**

kemitraan strategis dengan semua pihak yang terlibat dalam mata rantai pembangunan ekonomi dan bisnis, dan membangun sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Selain itu, juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan ekonomi dan bisnis dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

### **Metode**

Penelitian kualitatif dalam ilmu akuntansi adalah pendekatan penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk memahami atau menjelaskan fenomena di dalam lingkungan akuntansi dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, citra, dan perilaku dari orang-orang yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Pendekatan ini dapat membantu para peneliti dalam memahami alasan dan motivasi di balik keputusan-keputusan akuntansi yang diambil oleh individu dan organisasi.

Penelitian kualitatif dalam ilmu akuntansi seringkali dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kasus, atau analisis dokumen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan akuntansi, praktik dan prosedur akuntansi yang digunakan, serta bagaimana pengambilan keputusan akuntansi memengaruhi kinerja organisasi. Contoh penelitian kualitatif dalam ilmu akuntansi dapat mencakup studi tentang praktek akuntansi etis, pengaruh budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan akuntansi, atau penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian kualitatif ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan akuntansi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yang dapat membantu para praktisi dan peneliti dalam mengembangkan kebijakan dan praktik akuntansi yang lebih baik.

(Hasanah & Harmawati, 2020) Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkenaan dengan penelitian. (Hasanah & Harmawati, 2020) menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007), terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam melakukan analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis literature rievew jurnal dipahami bahwa jenis laporan keuangan memiliki 2 kategori. (Christian et al., 2021) Laporan keuangan sebagai salah satu sumber dalam menganalisis kinerja suatu perusahaan, yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akuntansi akrual adalah laporan keuangan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas dengan menggunakan prinsip akuntansi akrual. Prinsip akuntansi akrual ini mengharuskan pengakuan

## **Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal**

pendapatan dan biaya berdasarkan saat terjadinya, bukan berdasarkan saat uang diterima atau dibayar. Laporan keuangan akuntansi akrual terdiri dari tiga laporan utama, yaitu Laporan laba rugi (income statement): Laporan ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan biaya selama periode tertentu, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Laporan arus kas (cash flow statement) Laporan ini memperlihatkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, termasuk dari operasi, investasi, dan pendanaan.

(Prasetya, 2012) SAK yang berkualitas merupakan salah satu pedoman pokok untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi perusahaan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna dan menciptakan transparansi bagi perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia, senantiasa berusaha untuk tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global, khususnya dalam hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi. standar laporan akuntansi yang baik. Konsistensi Laporan keuangan harus konsisten dalam pengukuran, presentasi, dan pengungkapan informasi keuangan. Konsistensi ini membantu memastikan bahwa pemakai laporan keuangan dapat membandingkan informasi keuangan perusahaan dari periode ke periode. Relevansi: Laporan keuangan harus mencakup informasi yang relevan dan material bagi pengambil keputusan. Informasi yang disajikan harus menggambarkan kondisi keuangan dan operasi perusahaan secara akurat dan lengkap.

Keandalan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus mengikuti prinsip akuntansi yang benar, melakukan audit yang tepat dan memeriksa ulang informasi yang disajikan. Keterbacaan: Laporan keuangan harus mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Bahasa dan format yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Komparabilitas. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ini akan membantu pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dan membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaingnya.

Kelengkapan Laporan keuangan harus mencakup seluruh informasi yang relevan dan material mengenai keuangan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus cukup lengkap sehingga pemakai laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan dengan baik. Materialitas: Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus material, artinya informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Menerapkan standar laporan akuntansi yang baik akan membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dapat dipercaya, dan mudah dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Hal ini juga dapat membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan investor. Neraca (balance sheet) Laporan ini memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam laporan keuangan akuntansi akrual, pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan

## Gilang Ganjar Amrih

prinsip akrual memungkinkan untuk memperlihatkan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Hal ini karena laporan keuangan akrual mencerminkan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan pada saat mereka terjadi, bukan pada saat uang diterima atau dibayar.

Pencatatan atau recording dalam akuntansi adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas atau organisasi dalam jurnal dan buku besar. Proses pencatatan ini meliputi memasukkan informasi transaksi seperti jumlah, tanggal, deskripsi transaksi, akun yang terlibat, dan jumlah debit dan kredit ke dalam sistem akuntansi. Dengan mencatat setiap transaksi keuangan, entitas dapat menentukan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitasnya pada suatu waktu tertentu dan dapat memantau kinerja keuangan mereka. Recording dalam akuntansi biasanya dilakukan menggunakan metode double-entry, di mana setiap transaksi dicatat dalam setidaknya dua akun yang berbeda, dengan jumlah yang sama dalam debit dan kredit. Hal ini memastikan bahwa total debit dan kredit dalam jurnal selalu seimbang, sehingga kesalahan pencatatan dapat dengan mudah ditemukan dan diperbaiki.

Proses pencatatan dalam akuntansi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan software akuntansi yang terkomputerisasi. Dalam kedua kasus, penting untuk memastikan bahwa sistem pencatatan yang digunakan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. (Kabupaten & Utara, 2022) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. (Kabupaten & Utara, 2022) Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 utama fungsi yaitu dalam manajemen: Perencanaan (planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Acuating) dan Pengawasan (Controlling). Perencanaan atau planning adalah proses yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk merencanakan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa depan guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam konteks bisnis, perencanaan sangat penting dalam mengarahkan kegiatan dan sumber daya organisasi agar tercapai hasil yang diinginkan.

(Zelmiyanti, 2015) dalam Johan (2010), penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah berhasil dan membawa manfaat, manfaat tersebut antara lain antara lain mendukung manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen. Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah menjadi trend global dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Beberapa negara maju yang telah menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara luas adalah Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Negara Inggris, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 2001 dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang



## **Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal**

mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. SAP kemudian direvisi pada tahun 2010 dan 2019 untuk meningkatkan kualitas dan transparansi informasi keuangan pemerintah. Selain itu, Inggris juga telah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang saling terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Di Australia, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 1990-an dan diatur dalam Australian Accounting Standards Board (AASB). Standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual telah diadopsi di semua level pemerintahan, termasuk federal, negara bagian, dan lokal. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Australia juga didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan.

Negara Kanada, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 2003 dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Kanada (PSAB). PSAB kemudian direvisi pada tahun 2011 dan 2018 untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 1990-an dan diatur dalam Public Sector Accounting Standards (PSAS). PSAS kemudian diganti dengan Public Sector Pemerintahan Accounting Standards (PAS) pada tahun 2014. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Selandia Baru juga didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis dan hasil berdasarkan hasil analisis kasus dikemukakan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di negara-negara maju telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta memperbaiki pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual juga telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan pemerintah sistem akuntansi, perencanaan seringkali terkait dengan perencanaan keuangan, yang mencakup perencanaan pengeluaran, investasi, dan pendapatan. Tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan organisasi atau individu agar dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

Proses perencanaan dalam akuntansi melibatkan penentuan sasaran keuangan dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut, mengidentifikasi sumber daya keuangan yang tersedia, dan mengembangkan rencana keuangan yang sesuai. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data keuangan, seperti laporan keuangan, anggaran, dan proyeksi keuangan. perencanaan bisnis, perencanaan dapat mencakup perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Perencanaan strategis melibatkan perumusan misi, visi, dan tujuan jangka panjang organisasi serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan taktis mencakup penentuan tujuan dan strategi jangka menengah serta pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan operasional melibatkan pengembangan rencana aksi terperinci dan jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan jangka pendek. jenis perencanaan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, seperti lingkungan bisnis, pesaing, perubahan pasar, dan perubahan regulasi. Dengan perencanaan yang tepat, organisasi atau individu dapat

## Gilang Ganjar Amrih

memaksimalkan peluang dan mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan keuangan dan bisnis.

(Priyono, 2012) Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara sistem pencatatan pada akuntansi di sektor pemerintahan masih menggunakan single entry. Pada sistem pencatatan ini, menurut Abdul Halim (2004) dalam Abdul Hafiz Tanjung (2008), pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aktiva tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu entitasnya.

(Putri, 2010) pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada 3600 sebelum masehi. Sejarah transaksi keuangan di Indonesia dapat dilacak dari zaman kolonial Belanda di mana perdagangan dan keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan dan praktik Belanda. Pada awalnya, transaksi keuangan di Indonesia didominasi oleh perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. Pada masa kemerdekaan Indonesia, sektor keuangan masih dalam tahap perkembangan. Pada tahun 1953, didirikan Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia.

Pada tahun 1960-an, terjadi pertumbuhan yang pesat di sektor keuangan di Indonesia, yang dipicu oleh pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah mulai membangun infrastruktur dan memperluas layanan perbankan ke seluruh Indonesia. Pada saat itu, sektor keuangan di Indonesia masih didominasi oleh bank-bank asing. Pada tahun 1970-an, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan bank-bank nasional dan mengurangi ketergantungan pada bank-bank asing. Pemerintah juga mulai memperkenalkan instrumen keuangan baru seperti surat berharga, obligasi, dan saham, sebagai alternatif dari tabungan dan deposito di bank. Pada tahun 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang berdampak pada Indonesia. Krisis ini memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi sektor keuangan di Indonesia, termasuk perbankan dan pasar modal. Pemerintah melakukan rekapitalisasi bank dan memperketat pengawasan sektor keuangan untuk menghindari krisis serupa di masa depan.

Saat ini, sektor keuangan di Indonesia terus berkembang dengan pesat dan semakin maju. Bank dan lembaga keuangan non-bank semakin banyak bermunculan, dan produk-produk keuangan semakin bervariasi, seperti kartu kredit, pinjaman online, dan investasi di pasar modal. (Ramdani & Agustina, 2019) Sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2003 bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah (RAPBN/RAPBD) disusun atau disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP), apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut berhasil maka hal itu berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP No.24 Tahun 2005

## **Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal**

tentang standar akuntansi pemerintah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah (RAPBN/RAPBD) yang harus disusun atau disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam UU tersebut:

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (LPPA) harus disusun atau disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP digunakan sebagai alat standarisasi pelaporan keuangan pemerintah, yang mencakup konsep, prinsip, prosedur dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah yang menggunakan SAP harus mencakup informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai pendapatan, belanja, utang, aset, dan kewajiban. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus memuat informasi yang lengkap dan transparan, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang menggunakan SAP harus disajikan secara terperinci, memuat informasi mengenai transaksi keuangan, penyajian neraca, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan.

SAP menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga penggunaan SAP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. (Ridwan, 2012) laporan keuangan pemerintah tersebut, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

(Ridwan, 2012) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut hanya bersifat sementara dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perubahan mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan.

karena memperhitungkan semua transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Penggunaan basis kas dalam SAP tidak berarti bahwa pemerintah hanya memperhitungkan transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pemerintah masih harus memperhitungkan transaksi non-kas seperti piutang, hutang, dan persediaan dalam SAP, namun hanya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatannya dan pembayarannya. Dalam praktiknya, SAP menggunakan suatu sistem terintegrasi yang menggabungkan kedua basis tersebut untuk memastikan

## **Gilang Ganjar Amrih**

bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan representatif serta memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan, termasuk pemerintah itu sendiri, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.

(Yulianto, 2012) menurut Cushing, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memahami kinerja ekonomis dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk tujuan pengendalian atas aktivitas penggunaan sumber daya tersebut. Jika definisi ini diterima, maka akuntansi dapat disejajarkan dengan sains lain yang menekankan aktivitas ilmiah sebagai sebuah proses untuk memahami realitas dan mengendalikan beberapa elemen terkait realitas tersebut. (Utama, 2021) kinerja keuangan perlu diseimbangkan dengan kinerja sosial, dan juga upayanya dalam pelestarian alam, agar terjadi kehidupan yang nyaman dan harmonis. Perusahaan memiliki peran penting dalam mengedepankan kehidupan harmonis karena perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Pada akhirnya, tujuan dari keberadaan perusahaan adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk pemilik atau investor.

### **Kesimpulan**

Aturan keuangan terhadap akuntansi berbasis akrual perusahaan dapat mengambil berbagai tindakan, seperti menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar, dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya dalam pengambilan keputusan strategis. Ini dapat mencakup memilih bahan baku yang berkelanjutan, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, dan menerapkan praktek bisnis yang etis dan transparan. jangka panjang, perusahaan yang mengedepankan kehidupan harmonis dapat memperoleh manfaat dari reputasi yang lebih baik dan meningkatkan daya tarik bagi investor, karyawan, dan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga dapat memainkan peran yang penting dalam memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, termasuk melalui partisipasi dalam inisiatif global dan nasional yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks.

# Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Karyawan dalam Menunjang Pengendalian Internal

## DFTARPUSTAKA

- Analisis Perbandingan...*, Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011. (2011).
- Burhany, Dian Imanina dan Nurniah. (2013). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Nurniah Politeknik Negeri Ujung Pandang*, 17.3(80), 279–298. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.262>
- Christian, Natalis, Veronica, Veronica, & Lim, Lisa. (2021). Perkembangan Akuntansi Thailand dan Analisis Shenanigans pada Perusahaan Group Lease. *Owner*, 5(2), 329–244. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.475>
- Gibbs, David. (2020). Green economy. *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, (December), 116–117. <https://doi.org/10.4324/9780367816681-49>
- Habsari, T. N., Sahabuddin, Z. A., & ... (2022). Profesionalisme Akuntan Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara Dalam Membangun Negeri. *Jurnal ...*, 3(1), 88–95. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v3i1.499>
- Hasanah, Nurlayli, & Harmawati, Diah. (2020). Manajemen Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Model Sentra dengan Pendekatan Beyond Centers And Circle Time ( BCCT ) Universitas Musamus and Circle Time ). Beyond Centers and Circles Time ( BCCT ) merupakan model pendekatan yang berpusat pada anak , proses pem. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 4(1), 30–33.
- Izzaty, Rita Eka, Astuti, Budi, & Cholimah, Nur. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Kabupaten, Gangga, & Utara, Lombok. (2022). *Jurnal ABDIMAS INDEPENDEN*. 3(1), 64–78.
- Manossoh, Hendrik. (2015). the Implementation of Governmental Accounting System To Initiate Good Government Governance in North Sulawesi Province. *Berkala Ilmiah Efiensi*, 15(05), 786–787.
- PRASETYA, FERRY DANU. (2012). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(4), 113–117. <https://doi.org/10.33508/jima.v1i4.257>
- Priyono, Nuwun. (2012). Pemerintahan Di Indonesia Periode Sebelum Reformasi sampai dengan Pasca-Reformasi. *Jurnal UTM*, 37(15 Januari 2012), 1–13.
- Putri, Anisa. (2010). Perkembangan Akuntansi Di Indonesia. *Agusutus*, 2, 38–49.
- Ramdani, Eldis, & Agustina, Neo. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan

## **Gilang Ganjar Amrih**

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5, 1–10.

Ridwan, R. (2012). Strategi Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Uatara). *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, XVI(03), 390–412.

Utama, Yopi Yudha. (2021). Analisis Akuntansi Sustainability Pada Bisnis Berkelanjutan Perumahan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 560–570. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2511>

Yulianto, Eko. (2012). Anomali Perkembangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 1–17.

Zelmiyanti, Oleh Riri. (2015). Perkembangan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Sektor Pemerintah Di Indonesia. *Jrak*, 6(1), 68–72.